

**PENGARUH MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN
KUALITAS AUDIT TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN
(Studi Empiris pada Badan Usaha Milik Negara di kota Padang)**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi Akuntansi
sebagai salah satu persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi*



OLEH:

NESIA ELVA CITRA
05223/2008

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

SURAT PERNYATAAN

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

PENGARUH MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN KUALITAS
AUDIT TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN
(Studi Empiris Pada Badan Usaha Milik Negara dikota Padang)

Nama : Nesia Elva Citra

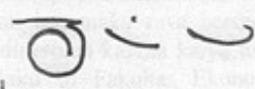
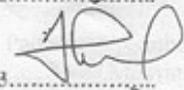
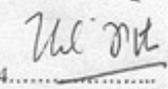
BP/NIM : 2008/05223

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Padang, 21 Mei 2013

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak	1..... 
2. Sekretaris	: Ertly Mulyani, SE, M.Si, Ak	2..... 
3. Anggota	: Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak	3..... 
4. Anggota	: Nelvirita, SE, M.Si, Ak	4..... 

ABSTRAK

Nesia Elva Citra : Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* dan Kualitas Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Badan Usaha Milik Negara Kota Padang). Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.

**Pembimbing : 1. Dr. Efrizal Syofyan SE, M.Si, Ak
2. Erly mulyani SE, M.Si, Ak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji : 1) Pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap integritas laporan keuangan, 2) Pengaruh kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan.

Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian yang bersifat kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah BUMN Kota Padang. Pemilihan sampel dengan metode *total sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Teknik pengumpulan data dengan teknik survei dengan menyebarkan kuesioner kepada masing-masing Pimpinan dan Kepala keuangan pada setiap BUMN. Metode analisis yang digunakan adalah Regresi berganda.

Hasil penelitian membuktikan bahwa 1) Mekanisme *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan dimana nilai signifikansi $0,057 > 0,05$ dan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-1,963 < 1,681$ (H_1 ditolak), 2) Kualitas audit berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan dimana nilai signifikansi $0,005 < 0,05$ dan nilai nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,009 > 1,681$ (H_2 diterima).

Dalam penelitian ini disarankan: 1) Bagi manajemen perusahaan dan pemegang saham agar dapat meningkatkan pengendalian internalnya dan melakukan pengawasan sehingga tercapai integritas laporan keuangan untuk para pemakai laporan keuangan 2) Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menggunakan metode wawancara langsung dengan responden, sehingga jawaban responden lebih mencerminkan jawaban yang sebenarnya, dan peneliti juga menyarankan agar dapat menambahkan variabel, seperti independensi auditor, *audit tenure* dan ukuran perusahaan. Diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan dapat menjelaskan sebesar 16,10%.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, ridho dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* dan Kualitas Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan” (Studi Empiris pada Badan Usaha Milik Negara Kota Padang)”. Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak terlepas dari hambatan dan rintangan. Namun demikian, atas bimbingan, bantuan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak dan Ibu Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak selaku dosen pembimbing yang telah banyak menyediakan waktu dan pemikirannya dalam penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.

4. Staf administrasi dan staf kepastakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah ikut membantu memberikan pelayanan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Pimpinan BUMN Kota Padang yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian ini.
6. Kedua orang tua serta kakak dan adik tercinta yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan agar penulis dapat mencapai apa yang dicita-citakan.
7. Teman-teman yang selalu memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, September 2013

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	
HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS.....	11
A. Kajian Teori	11
1. Integritas Laporan Keuangan	11
2. Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i>	18
3. Kualitas Audit.....	27
4. Penelitian terdahulu	35
B. Hubungan Antar Variabel	37
C. Kerangka Konseptual.....	40
D. Hipotesis	42
BAB III. METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Populasi, Sampel, dan Responden.....	43
C. Jenis Data dan Sumber Data	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel	46

F. Instrumen Penelitian	48
G. Uji Validitas dan Reliabilitas	50
H. Hasil Uji Coba Instrumen	51
I. Uji Asumsi Klasik	52
J. Teknik Analisis Data	54
K. Uji kelayakan Model.....	57
L. Uji Hipotesis.....	58
M. Definisi Operasional.....	59
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	60
B. Demografi Responden	61
C. Deskripsi Variabel Penelitian	65
D. Statistik Deskriptif.....	71
E. Uji Validitas Dan Reliabilitas Penelitian.....	72
F. Hasil Uji Asumsi Klasik	74
G. Analisis Data	77
H. Pembahasan.....	80
BAB V. PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Keterbatasan.....	84
C. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Nama BUMN Kota Padang	44
2. Daftar skor jawaban item pertanyaan.....	48
3. Kisi-kisi instrumen penelitian.....	48
4. Nilai Cronbach's Alpha & Corrected Item-Total Correlation.....	52
5. Tingkat Pengembalian Kuesioner.....	61
6. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	61
7. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	62
8. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja	63
9. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	63
10. Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	64
11. Distribusi Variabel Integritas Laporan Keuangan	65
12. Distribusi Variabel Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i>	67
13. Distribusi Variabel Kualitas Audit.....	69
14. Statistik Deskriptif	71
15. Nilai Corrected Item-Total Correlation terkecil	72
16. Nilai Cronbach's Alpha.....	73
17. Uji Normalitas	74
18. Uji Multikolinearitas	75
19. Uji Heteroskedastisitas	76
20. Koefisien Determinasi.....	77
21. Persamaan Regresi	77
22. Uji F (F-test)	79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuesioner Penelitian	88
2. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen	92
3. Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian	95
4. Uji Asumsi Klasik	98
5. Uji Model	99
6. Uji Hipotesis	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Laporan keuangan merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan tersebut dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh para pemilik perusahaan. Disamping itu laporan keuangan dapat juga digunakan untuk memenuhi tujuan-tujuan lain yaitu sebagai laporan kepada pihak-pihak di luar perusahaan (Baridwan,2004). Informasinya harus berguna untuk menilai masa lalu dan masa yang akan datang. Laporan keuangan yang berintegritas harus mampu menyediakan informasi yang relevan dan berguna pengambilan keputusan ekonomi maupun keputusan investasi bagi para penggunanya. Informasi dalam laporan keuangan juga harus memiliki kriteria andal (*reliable*).

Menurut Standar Akuntansi Keuangan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 1 edisi 2009, informasi dapat dikategorikan andal atau wajar ketika informasi tersebut menyajikan secara jujur transaksi, peristiwa dan kondisi lain baik yang diminta untuk disajikan atau sewajarnya diharapkan untuk disajikan dan konsekuensinya, informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi dari pengguna laporan keuangan. Informasi akuntansi keuangan disampaikan kepada pihak ekstern perusahaan dalam bentuk

laporan keuangan. Informasi yang disajikan haruslah wajar, dapat dipercaya dan tidak menyesatkan pemakainya sehingga keputusan masing-masing pihak dapat terpenuhi.

Laporan keuangan meliputi Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini: laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi komprehensif selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya dan laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

Laporan keuangan bermanfaat dalam pengambilan keputusan untuk menjamin para pemakai laporan keuangan bahwa laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan keuangan merupakan sarana utama bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan keadaan keuangan pada pihak luar perusahaan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan arus kas suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Manajemen perusahaan memikul tanggung jawab utama dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Menurut *Statement of Financial Accounting Concepts* (SFAC) No. 2 kualitas informasi yang menjamin bahwa informasi secara wajar bebas dari kesalahan dan bias serta secara jujur menyajikan apa yang dimaksudkan untuk dinyatakan. Sedangkan menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK), karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ciri khas yang memuat informasi dalam laporan keuangan. Karakter-karakter tersebut terdiri dari empat komponen yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat di perbandingkan.

Laporan keuangan dikatakan berintegritas apabila laporan keuangan tersebut memenuhi kualitas reliability (Kieso, 2008) dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Reliability memiliki kualitas sebagai berikut: 1) daya uji (*verifiability*), ketepatan penyajian (*representational faithfulness*) dan netralitas (*neutrality*). Informasi akuntansi yang memiliki integritas yang tinggi akan dapat diandalkan karena merupakan suatu penyajian yang jujur sehingga memungkinkan pengguna informasi akuntansi bergantung pada informasi tersebut. Oleh karena itu, informasi yang memiliki integritas yang tinggi memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan pembaca laporan keuangan untuk membantu membuat keputusan.

Agar integritas laporan keuangan tercapai maka perusahaan perlu menerapkan Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). *Good Corporate Governance* adalah prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan

perusahaan. Berdasarkan definisi tersebut, nampak dengan jelas bahwa *Corporate Governance* merupakan upaya yang dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk menjalankan usahanya secara baik sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing (Arief, 2009).

Good Corporate Governance merupakan suatu cara untuk menjamin bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan stakeholder. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* menuntut adanya perlindungan yang kuat terhadap hak-hak pemegang saham minoritas. Prinsip-prinsip atau pedoman pelaksanaan *Corporate Governance* menunjukkan adanya perlindungan tersebut. *Good Corporate Governance* secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya dan kedua, kewajiban perusahaan untuk, melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan dan stakeholder (YPPMI & SC, 2002 dalam sherlly,2011)

Corporate governance merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan antara dewan komisaris, direksi, dan manajemen agar tercipta keseimbangan dalam pengelolaan perusahaan. Perusahaan yang telah menerapkan *Corporate Governance* dengan baik seharusnya sudah memenuhi prinsip - prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu *fairness, transparency, accountability, dan responsibility*. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip -

prinsip GCG tersebut secara konsisten terbukti dapat meningkatkan integritas laporan keuangan (Beasley dalam Arief & Bambang, 2007). Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, *Good Corporate Governance* secara singkat dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.

Mekanisme *Good corporate governance* merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol/pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme *governance* diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem *governance* dalam sebuah organisasi. *Corporate governace* sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (OECD dalam Jamaan 2008) .

Menurut Imam (2002) prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* bermanfaat dalam meningkatkan integritas laporan keuangan, sehingga penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi dalam pengelolaan perusahaan maupun pihak-pihak berkepentingan dapat dihindari atau sekurang-kurangnya dapat diminimalisasi. Akibat tindakan tersebut, prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang konsisten akan menghalangi kemungkinan rekayasa kinerja yang mengakibatkan nilai fundamental perusahaan tidak tergambar dalam laporan keuangan.

Selain mekanisme *good corporate governance*, integritas laporan keuangan juga terkait dengan kualitas audit. Audit dilakukan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran suatu laporan keuangan. Arens dkk (2008) menyatakan Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dengan kriteria yang telah ditetapkan. Apabila kualitas audit dapat memenuhi kriteria yang telah ditetapkan maka integritas suatu laporan keuangan dapat tercapai. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Kualitas audit bisa terwujud apabila dapat memenuhi standar audit yang berlaku umum. Standar audit merupakan pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan. Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitas profesional seperti kompetensi dan independensi, persyaratan pelaporan, dan bukti (Randal J dkk, 2011).

Sedangkan para pengguna laporan keuangan berpendapat bahwa kualitas audit yang dimaksud terjadi jika auditor dapat memberikan jaminan bahwa tidak ada salah saji yang material (*no material misstatements*) atau kecurangan (*fraud*) dalam laporan keuangan. Auditor sendiri memandang kualitas audit terjadi apabila mereka bekerja sesuai standar profesional yang ada, dapat menilai resiko bisnis dengan tujuan untuk meminimalisasi resiko litigasi, dapat meminimalisasi ketidakpuasan dan menjaga kerusakan reputasi auditor.

Menurut De Angelo dalam Pancawati (2008) Kualitas audit sebagai suatu kemungkinan (*joint probability*) dimana seorang auditor akan menemukan dan

melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya. Kemungkinan dimana auditor akan menemukan salah saji tergantung pada kemampuan teknis auditor sementara tindakan melaporkan salah saji tergantung pada independensi auditor tersebut. Kualitas audit ini sangat penting karena kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan.

Widagdo *et al* dalam siska (2008) menggunakan 12 atribut untuk mengukur kualitas audit, atribut tersebut adalah sebagai berikut : 1) Pengalaman melakukan audit, 2) memahami industri klien, 3) responsif atas kebutuhan klien, 4) taat pada standar umum, 5) independen, 6) sikap hati-hati, 7) komitmen yang kuat terhadap kualitas audit, 8) keterlibatan pimpinan, 9) melakukan pekerjaan lapangan dengan tepat, 10) keterlibatan komite audit, 11) standar etika yang tinggi, 12) tidak mudah percaya. Penelitian ini mencoba mengulang kembali 12 atribut tersebut yang pernah digunakan oleh widagdo *et al* untuk mengukur kualitas audit yang dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan.

Berbagai penelitian yang berkaitan dengan *Good Corporate Governance* dan kualitas audit laporan keuangan adalah sebagai berikut. Menurut Jamaan (2008) yang berjudul pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* dan kualitas kantor Akuntan Publik terhadap integritas informasi laporan keuangan menyatakan bahwa GCG dapat meningkatkan integritas laporan keuangan yang salah satunya adalah meningkatkan laba yang diperoleh.

Penelitian Afria (2008) tentang pengaruh independensi auditor eksternal dan prinsip-prinsip GCG terhadap Integritas laporan keuangan pada perusahaan

BUMN. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa prinsip-prinsip GCG berpengaruh signifikan positif terhadap integritas laporan keuangan BUMN.

Penelitian Sherlly (2011) tentang pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin baik penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* maka kualitas laporan keuangan juga akan semakin baik.

Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan BUMN dan badan lainnya tahun 2011 menunjukkan adanya 41 kasus kelemahan SPI, terdiri atas sebanyak 11 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan; sebanyak 7 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan sebanyak 23 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Kasus-kasus tersebut di antaranya terjadi karena pejabat yang bertanggung tidak mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku serta lemahnya pengawasan dan pengendalian pimpinan BUMN dan badan lainnya. Selain itu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 41 kasus senilai Rp14,00 triliun dan USD201.05 ribu (ekuivalen Rp1,72 miliar) sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan dalam pemeriksaan atas satu laporan keuangan BUMN dan tujuh badan lainnya (www.bpk.go.id)

Munculnya kasus ini menimbulkan pertanyaan bagi berbagai pihak terhadap *corporate governance* yang mengakibatkan terungkapnya kenyataan bahwa *good corporate governance* belum diterapkan dengan baik sehingga

integritas laporan keuangan tidak tercapai. Fenomena yang terjadi ini juga dapat menunjukkan suatu bentuk kegagalan integritas laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan. Maka dari itu, penulis berminat untuk mengkaji **Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* dan Kualitas Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan muncul ketertarikan untuk melakukan pengujian kembali mengenai pengaruh kualitas audit dan mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap integritas laporan keuangan dengan menggunakan data primer (kuesioner). Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sejauhmana pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap Integritas laporan keuangan
2. Sejauhmana pengaruh Kualitas Audit terhadap Integritas laporan keuangan

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* dan Kualitas Audit terhadap Integritas laporan keuangan.
2. Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap Integritas Laporan keuangan.

3. Pengaruh Kualitas Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat :

1) Bagi penulis

Menambah pengetahuan tentang keakuratan laporan keuangan perusahaan BUMN sehingga dapat membandingkan teori dengan kenyataan yang terjadi.

2) Bagi pemakai laporan keuangan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pemakai laporan keuangan dan praktisi penyelenggara perusahaan dalam memahami *corporate governanve* terkait dengan laporan keuangan sehingga dapat meningkatkan nilai dan pertumbuhan perusahaan.

3) Bagi Penelitian selanjutnya

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Integritas Laporan Keuangan

1.1 Laporan keuangan dan Integritas laporan keuangan

Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Laporan keuangan merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan tersebut dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh para pemilik perusahaan. Disamping itu laporan keuangan dapat juga digunakan untuk memenuhi tujuan-tujuan lain yaitu sebagai laporan kepada pihak-pihak di luar perusahaan (Baridwan, 2004).

Menurut Standar Akuntansi Keuangan dalam PSAK No1 Revisi tahun 2009, Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas, yang biasanya terdiri dari laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi komprehensif selama periode laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya dan laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. Informasi

yang disajikan dalam laporan keuangan biasanya bersifat umum, artinya tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan informasi setiap pemakai, namun cukup memenuhi sebagian besar kebutuhan informasi pemakai.

Laporan keuangan merupakan sarana pengomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan ini menampilkan sejarah perusahaan yang di kuantifikasi dalam nilai moneter. Mulyadi dalam jamaan (2008) mendefinisikan integritas sebagai berikut: “Integritas adalah prinsip moral yang tidak memihak, jujur, seseorang yang berintegritas tinggi memandang fakta seperti apa adanya dan mengemukakan fakta tersebut seperti apa adanya.”

Terkait dengan integritas laporan keuangan, Sutojo & Aldridge dalam Afria (2008) menyatakan bahwa laporan keuangan yang disajikan secara benar, jujur dan transparan merupakan sarana dasar untuk mengungkapkan kondisi operasi bisnis dan keuangan perusahaan. Integritas laporan keuangan menunjukkan informasi yang benar, jujur, akurat serta bebas dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan dan disengaja oleh pihak manajemen perusahaan dalam memanipulasi angka-angka akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan untuk menyesatkan pemakai laporan keuangan dalam menilai perusahaannya. Penyajian yang wajar mensyaratkan penyajian secara jujur dampak dari transaksi, peristiwa dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang diatur dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (Standar Akuntansi Keuangan dalam PSAK No 1 edisi 2009).

Laporan keuangan memiliki informasi yang dibutuhkan dan nantinya akan digunakan oleh berbagai pihak, termasuk manajemen perusahaan itu sendiri. Laporan keuangan menjadi alat utama bagi perusahaan untuk menyampaikan informasi keuangan mengenai pertanggungjawaban pihak manajemen. Namun pihak yang paling berkepentingan dengan laporan keuangan sebenarnya adalah para pengguna eksternal (diluar manajemen). Pengguna eksternal berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya sehingga membutuhkan laporan keuangan sebagai untuk mengetahui kinerja perusahaan.

Laporan keuangan dikatakan berintegritas apabila laporan keuangan tersebut memenuhi kualitas *reliability* (Kieso, 2008) dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. *Reliability* memiliki kualitas sebagai berikut:

1) Daya Uji (*Verifiability*)

Laporan keuangan suatu entitas yang mempunyai kondisi yang sama dengan laporan keuangan entitas lain, akan mendapat opini yang sama jika diaudit oleh auditor yang berbeda.

2) Ketepatan Penyajian (*Representational faithfulness*)

Angka dan keterangan yang disajikan sesuai dengan apa yang ada dan benar-benar terjadi.

3) Netralitas (*Neutrality*)

Informasi dari laporan keuangan harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan

beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan berlawanan.

Terkait dengan integritas laporan keuangan, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang memiliki integritas yang tinggi maka telah memenuhi dua karakteristik utama dalam suatu laporan keuangan. Informasi akuntansi yang memiliki integritas yang tinggi akan dapat diandalkan karena merupakan suatu penyajian yang jujur sehingga memungkinkan pengguna informasi akuntansi bergantung pada informasi tersebut. Oleh karena itu, informasi yang memiliki integritas yang tinggi memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan pembaca laporan keuangan untuk membantu membuat keputusan.

Dalam jamaan (2008) Integritas informasi laporan keuangan menyangkut keandalan informasi akuntansi yang dihasilkan yaitu kejujuran dalam penyajian, dapat dipercaya, dan netralitas yang antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kejujuran (*faithfulness*)

Berarti bahwa terdapat kesesuaian antara satu ukuran keuangan atau penjelasan dan fenomena aktivitas ekonomi yang diukur atau dijelaskan. Dalam akuntansi, sumber-sumber ekonomi, kewajiban dan kejadian-kejadian yang membawa perubahan sumber-sumber dan kewajiban-kewajiban dinyatakan dalam laporan keuangan.

2. Dapat dipercaya (*Reliability*)

Berarti bahwa seorang pengguna dapat menggantungkan atau memiliki keyakinan pada informasi yang dilaporkan. Informasi akuntansi dipertimbangkan

dapat dipercaya (*reliability*) jika informasi secara nyata menyatakan apa yang dimaksud, apa yang diungkapkan dan dapat diuji kebenarannya.

3. Netral (*Neutrality*)

Berarti bahwa informasi akuntansi harus netral, atau tidak memihak yang memberikan dampak pada perilaku para pengguna informasi. Oleh karena informasi akuntansi memberi pengaruh terhadap lingkungannya, maka dipandang penting bahwa informasi akuntansi harus bersifat netral atau tidak bias. Sementara, laporan keuangan terdukung pada satu konsekuensi ekonomi umum, seperti alokasi sumber kekayaan, oleh karenanya informasi harus bersifat netral dari segala konsekuensi lainnya.

Hal ini sejalan dengan definisi dalam SFAC No. 2, yaitu kualitas informasi yang menjamin bahwa informasi secara wajar bebas dari kesalahan dan bias dan secara jujur menyajikan apa yang dimaksudkan untuk dinyatakan.

1.2 Tujuan laporan keuangan

Dalam kerangka konseptual *Financial Accounting Standards Board* (FASB No. 2) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna untuk keputusan bisnis. Laporan keuangan seharusnya memberikan informasi yang berguna untuk investor dan kreditor dan potensial untuk membuat keputusan investasi, kredit dan keputusan lain yang sejenis seperti yang dinyatakan dalam *Statement of Financial Accounting Concepts* (SFAC) No.1.

Menurut Kieso (2008) tujuan laporan keuangan harus menyediakan informasi yang :

1. Berguna bagi investor serta kreditor saat ini atau potensial dan para pemakai lainnya untuk membuat keputusan investasi, kredit dan keputusan serupa secara rasional. Informasi yang disajikan harus komprehensif bagi mereka yang memiliki pemahaman yang memadai tentang aktivitas-aktivitas ekonomi dan bisnis serta ingin mempelajari informasi tersebut secara seksama.
2. Membantu investor serta kreditor saat ini atau potensial dan para pemakai lainnya dalam menilai jumlah, penetapan waktu, dan ketidakpastian penerimaan kas prospektif dari dividen atau bunga dan hasil dari penjualan, penebusan atau jatuh tempo sekuritas atau pinjaman. Karena arus kas investor dan kreditor berhubungan dengan arus kas perusahaan, maka laporan keuangan harus menyediakan informasi yang dapat membantu investor, kreditor serta pemakai lainnya menilai jumlah, penetapan waktu dan ketidakpastian arus kas masuk bersih prospektif pada perusahaan terkait.
3. Dengan jelas menggambarkan sumber daya ekonomi dari sebuah perusahaan, klaim terhadap sumber daya tersebut (kewajiban perusahaan untuk mentransfer sumber daya ke entitas lainnya dan ekuitas pemilik), dan pengaruh dari transaksi, kejadian, serta situasi yang mengubah sumber daya perusahaan dan klaim pihak lain terhadap sumber daya tersebut.

Singkatnya, tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan (1) informasi yang berguna bagi keputusan investasi dan kredit, (2) informasi yang berguna dalam menilai arus kas masa depan, dan (3) informasi mengenai sumber daya perusahaan, klaim terhadap sumber daya tersebut dan perubahannya.

Sedangkan menurut Standar Akuntansi Keuangan dalam PSAK No 1 edisi 2009, Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

1.3 Karakteristik kualitatif laporan keuangan

Agar informasi dalam laporan keuangan bermanfaat untuk pengambilan keputusan oleh pemakainya maka laporan keuangan harus memiliki karakter kualitatif. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) menyebutkan empat karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagai berikut:

1) Dapat dipahami.

Kualitas penting informasi yang ada di dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis akuntansi serta kemauan mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.

2) Relevan.

Informasi harus relevan agar bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam memproses pengambilan keputusan. Informasi mempunyai kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa kini, menegaskan

atau mengoreksi hasil evaluasi mereka masa lalu. Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakekat dan materialitasnya. Informasi dipandang material kalau ada kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut yang dapat mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil atas dasar laporan keuangan.

3) Keandalan.

Informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus dan jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Unsur-unsur substansi mengungguli bentuk, netral pertimbangan sehat dan kelengkapan.

4) Dapat dibandingkan.

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

2. Mekanisme Good Corporate Governance

2.1 Definisi Good Corporate Governance

Konsep *Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai serangkaian mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar

operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). *Good Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku (IICG 2008).

Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : Per-01/MBU/2011 tentang penerapan praktik GCG pada BUMN mendefinisikan GCG sebagai : Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Bank Dunia (World Bank) mendefinisikan *good corporate governance* (GCG) sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib di penuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, GCG secara singkat dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan.

Menurut Zarkasyi dalam Vinda (2010) Good Corporate Governance pada dasarnya merupakan suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa GCG tersebut merupakan:

1. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan komisaris, Direksi, Pemegang Saham dan Para *Stakeholder* lainnya.
2. Suatu sistem pengawasan dan perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang, yaitu pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan.
3. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, berikut pengukuran kinerjanya.
4. Sebagai sebuah proses/mekanisme, GCG memastikan transparansi dan proses perusahaan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, dan pengukuran kinerjanya untuk menyediakan perlindungan yang efektif bagi *stakeholder* sehingga menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan.

2.2 Mekanisme Good Corporate Governance

Mekanisme *good corporate governance* merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol/pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme *governance* diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem *governance* dalam sebuah organisasi. *Corporate governace* sebagai

seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (OECD dalam Jamaan 2008) .

Menurut Ashurov (2010) dalam wulan dkk, efektivitas *corporate governance* ditentukan oleh bagaimana mekanisme *corporate governance* tersebut bekerja dalam perusahaan. Sebaik apapun suatu struktur *corporate governance* tetapi jika mekanisme/prosesnya tidak berjalan sebagaimana mestinya maka tujuan akhir melindungi kepentingan pemegang saham dan *stakeholders* tidak akan pernah tercapai (Herwidayatmo, 2000 dalam wulan dkk). Menurut Iskander & Chamlou (2000) dalam Jamaan (2008), mekanisme dalam pengawasan *corporate governance* dibagi dalam dua kelompok, yaitu:

1) Mekanisme Internal (*Internal Mechanisms*)

Merupakan cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham (RUPS), komposisi dewan direksi, ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen dan pertemuan dengan *board of director*.

2) Mekanisme eksternal (*external mechanism*)

Merupakan cara mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal, seperti pengendalian oleh perusahaan dan pengendalian pasar.

2.3 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Tujuan *GCG* pada intinya adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut adalah pihak internal yang meliputi dewan komisaris, direksi, karyawan, dan pihak eksternal yang meliputi investor, kreditur, pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*). Dalam praktiknya *CG* berbeda di setiap negara dan perusahaan karena berkaitan dengan sistem ekonomi, hukum, struktur kepemilikan, sosial dan budaya. Perbedaan praktik ini menimbulkan beberapa versi yang menyangkut prinsip-prinsip *CG*, namun pada dasarnya mempunyai banyak kesamaan.

Sedangkan menurut *Organization for Economic Corporation and Development* atau OECD (2004), prinsip dasar *GCG* adalah: kewajaran (*fairness*), akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), dan tanggung jawab (*responsibility*). Prinsip-prinsip tersebut digunakan untuk mengukur seberapa jauh *GCG* telah diterapkan dalam perusahaan :

1) Kewajaran (*fairness*).

Prinsip kewajaran menekankan pada adanya perlakuan dan jaminan hak-hak yang sama kepada pemegang saham minoritas maupun mayoritas, termasuk hak-hak pemegang saham asing serta investor lainnya. Praktik kewajaran juga mencakup adanya sistem hukum dan peraturan serta penegakannya yang jelas dan berlaku bagi semua pihak. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan pemegang saham dari praktik kecurangan (*fraud*) dan praktik-praktik *insider trading* yang dilakukan oleh agen/manajer. Prinsip kewajaran ini dimaksudkan

untuk mengatasi masalah yang timbul dari adanya hubungan kontrak antara pemilik dan manajer karena diantara kedua pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda (*conflict of interest*).

2. Akuntabilitas (*accountability*).

Prinsip akuntabilitas berhubungan dengan adanya sistem yang mengendalikan hubungan antara unit-unit pengawasan yang ada di perusahaan. Akuntabilitas dilaksanakan dengan adanya dewan komisaris dan direksi independen, dan komite audit. Akuntabilitas diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi *Agency Problem* yang timbul antara pemegang saham dan direksi serta pengendaliannya oleh komisaris. Praktik-praktik yang diharapkan muncul dalam menerapkan akuntabilitas diantaranya pemberdayaan dewan komisaris untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen guna memberikan jaminan perlindungan kepada pemegang saham dan pembatasan kekuasaan yang jelas di jajaran direksi.

3. Transparansi (*transparency*).

Prinsip dasar transparansi berhubungan dengan kualitas informasi yang disajikan oleh perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat tergantung dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu dan dapat dibandingkan dengan indikator-indikator yang sarna. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi yang berbasiskan standar akuntansi dan *best practices* yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas, mengembangkan teknologi informasi dan sistem

informasi akuntansi manajemen untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh dewan komisaris dan direksi; termasuk juga mengumumkan jabatan yang kosong secara terbuka. Dengan kata lain prinsip transparansi ini menghendaki adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam penyajian (*disclosure*) informasi yang dimiliki perusahaan.

4. *Responsibilitas (responsibility)*.

Responsibilitas diartikan sebagai tanggungjawab perusahaan sebagai anggota masyarakat untuk mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku serta pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial. Responsibilitas menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Hal tersebut untuk merealisasikan tujuan yang hendak dicapai GCG yaitu mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis dan pihak-pihak lainnya.

Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan *Good Corporate Governance* di BUMN harus senantiasa berdasarkan pada lima prinsip dasar :

- a. *Transparansi (Transparency)*: yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

- b. Akuntabilitas (*Accountability*) : yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaa dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif
- c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*) : yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.
- d. Kemandirian (*Independency*) : yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.
- e. Kewajaran (*Fairness*) : yaitu, keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

2.4 Manfaat penerapan *Good Corporate Governance*

Menurut Rifa'i (2003), manfaat bagi perusahaan jika menerapkan *good corporate governance* meliputi :

1. Alokasi sumber daya yang efisien

Perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* akan menerapkan alokasi sumber daya yang ada dengan baik sehingga penerapan ini akan menciptakan efisiensi dari penggunaan sumber daya tersebut.

2. Pengambilan keputusan secara efektif dan teradaptasi

Transparansi manajemen dalam sebuah perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* akan membawa pada kondisi pengambilan keputusan yang efektif dan terdaptasi. Ketersediaan informasi yang terkait dengan suatu hal khusus memungkinkan manajemen mempunyai dasar yang kuat dalam memutuskan sesuatu.

3. Arah perusahaan yang jelas

Perusahaan yang menetapkan *good corporate governance* mempunyai arah yang jelas karena informasi penting serta *guidelines* tersedia bagi semua orang di dalam perusahaan. Sehingga seluruh karyawan akan mengetahui visi, misi sasaran jangka pendek maupun jangka panjang perusahaan.

4. Peningkatan efisiensi

Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* akan dapat meningkatkan efisiensi perusahaan dengan mengurangi biaya yang terjadi akibat tingginya birokrasi, perilaku-perilaku tidak etis dan kegiatan-kegiatan kontra produktif lainnya

5. Lingkungan kerja yang kondusif

Lingkungan kerja yang kondusif merupakan manfaat lain dari penerapan *good corporate governance*. Para *stakeholder* yang puas dengan kinerja manajemen akan menempatkan perusahaan pada posisi yang aman, dimana tidak ada ancaman atau sikap yang akan merugikan perusahaan. Kondisi ini tentunya akan menciptakan rasa aman dan perasaan memiliki diantara karyawan terhadap perusahaan yang pada akhirnya akan mendukung tercapainya sasaran-sasaran perusahaan.

3. Kualitas Audit

3.1 Pengertian Kualitas Audit

Arens dkk (2008) menyatakan auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dengan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Menurut Sukrisno Agoes dalam Sendi dkk (2009) auditing adalah Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Manfaat dilakukan audit atas laporan keuangan antara lain, menambah kredibilitas laporan keuangan, mengurangi kecurangan perusahaan, dan memberikan dasar yang lebih dipercaya untuk pelaporan pajak dan laporan keuangan lain yang harus diserahkan kepada pemerintah. Tujuan dari audit laporan keuangan adalah untuk memberikan kepastian integritas laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen. Kepastian mengenai relevansi dan keandalan dari laporan keuangan perusahaan sangat membantu pihak eksternal dalam pengambilan keputusan bisnis (Mayangsari, 2003).

Secara umum pengertian di atas dapat diartikan bahwa audit adalah proses sistematis yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti dan bertujuan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Kualitas audit sebagai suatu kemungkinan (*joint probability*) dimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya. Kemungkinan dimana auditor akan menemukan salah saji tergantung pada kemampuan teknis auditor sementara tindakan melaporkan salah saji tergantung pada independensi auditor tersebut. Kualitas audit ini sangat penting karena kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan (De Angelo 1981 dalam Pancawati 2008).

Kualitas audit bisa terwujud apabila dapat memenuhi standar audit yang berlaku umum. Standar audit merupakan pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan. Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitas profesional seperti kompetensi dan independensi, persyaratan pelaporan, dan bukti (Randal J dkk, 2011). Apabila kualitas audit dapat memenuhi kriteria yang telah ditetapkan maka integritas suatu laporan keuangan dapat tercapai.

Arens dkk (2008) menyatakan bahwa standar auditing merupakan pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan historis. Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitas profesional seperti kompetensi dan independensi, persyaratan pelaporan, dan bukti.

Sedangkan Christiawan (2005) mengungkapkan, kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu independensi dan kompetensi. Dari definisi di atas, maka kesimpulannya adalah auditor yang kompeten adalah auditor yang “mampu”

menemukan adanya pelanggaran sedangkan auditor yang independen adalah auditor yang "mau" mengungkapkan pelanggaran tersebut. Jelas terlihat bahwa independensi dan kompetensi seperti dikatakan Christiawan (2005) dan merupakan faktor penentu kualitas audit dilihat dari sisi auditor.

3.2 Konsep atribut kualitas audit

Atribut merupakan sifat atau karakteristik yang melekat dalam suatu objek syahu dalam ressi (2011). Berikut ini adalah 12 atribut-atribut kualitas audit menurut widagdo et al dalam siska (2008) :

1. Pengalaman melakukan audit

Dalam melaksanakan audit sampai pada suatu pernyataan, auditor harus senantiasa sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan formalnya yang di perluas melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam praktik-praktik audit (IAI, 2001).

2. Memahami industri klien

Auditor harus memperoleh pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sifat bisnis satuan usaha, organisasinya dan karakteristik operasinya. Menurut IAI pengetahuan tentang bisnis merupakan suatu kerangka acuan yang digunakan oleh auditor untuk melaksanakan pertimbangan profesional. Jadi pemahaman industri klien adalah pengetahuan umum yang diperoleh auditor tentang ekonomi dan industri yang menjadi tempat beroperasinya entitas dan bagaimana entitas beroperasi.

Menurut arens dkk (2008) auditor haurs memperoleh pemahaman yang memadai tentang entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internalnya,

untuk menilai resiko salah saji yang material pada laporan keuangan baik karena kekeliruan maupun kecurangan, dan untuk merancang sifat, penetapan waktu, serta luas prosedur audit selanjutnya.

3. Responsif kebutuhan klien

Klien berharap menerima lebih banyak dari hanya opini audit klien saja, tetapi klien juga ingin mendapatkan keuntungan dari keahlian dan pengetahuan auditor dibidang usaha dan memberikan nasehat tanpa diminta.(Behn dalam siska (2008)).

4. Taat pada standar umum

Arens dkk (2008) mengatakan bahwa standar auditing merupakan pedoman bagi auditor dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya. Standar-standar ini meliputi pertimbangan mengenai kualitas profesional mereka, seperti keahlian dan independensi, persyaratan pelaporan, dan bahan bukti.

5. Independen

Independen menurut Arens dkk. (2008) dapat diartikan mengambil sudut pandang yang tidak bias. Auditor tidak hanya harus independen dalam fakta, tetapi juga harus independen dalam penampilan. Independensi dalam fakta (*independence in fact*) ada bila auditor benar-benar mampu mempertahankan sikap yang tidak bias sepanjang audit, sedangkan independensi dalam penampilan (*independent in appearance*) adalah hasil dari interpretasi lain atas independensi ini.

6. Sikap hati-hati

Penggunaan kemahiran profesional secara cermat dan seksama dalam semua aspek audit mengartikan bahwa auditor wajib melaksanakan tugasnya dengan kesungguhan dan kecermatan, atau keperdulian profesional. Kecermatan dan keseksamaan profesional meliputi ketelitian dalam memeriksa kelengkapan kertas kerja, mengumpulkan bahan bukti audit yang memadai, dan menyusun laporan audit yang lengkap. Sebagai seorang profesional, auditor harus menghindari kelalaian dan ketidakjujuran (Arens dkk, 2008). Kehati-hatian profesional mengharuskan auditor untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan kompetisi dan ketekunan. Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesionalnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya.

7. Komitmen yang kuat terhadap kualitas audit

Komitmen dapat didefinisikan sebagai: (1) Sebuah kepercayaan pada dan penerimaan terhadap tujuan-tujuan dari nilai-nilai organisasi dan atau profesi, (2) Sebuah kemauan untuk menggunakan usaha yang sungguh-sungguh guna kepentingan organisasi dan atau profesi, (3) Sebuah keinginan untuk memelihara keanggotaan dalam organisasi dan atau profesi (widagdo dalam ressi, 2011). Dalam melaksanakan tugasnya, seorang auditor harus meningkatkan koordinasi dan hubungannya dengan KAP yang besar dan berskala internasional. Dengan demikian, diharapkan auditor akan mampu menyajikan informasi-informasi yang sedang berkembang di berbagai negara, terutama yang mempunyai hubungan dengan bidang usaha klien, sehingga kualitas kerja auditor akan meningkat selaras

dengan peningkatan pengetahuannya yang lintas negara. Hal ini berkaitan erat dengan komitmen yang kuat seorang auditor terhadap kualitas audit (Behn *et. al.* Dalam siska, 2008)

8. Keterlibatan pemimpin

Keterlibatan para pemimpin auditor membantu terbentuknya komunikasi dua arah yang lebih intensif antara klien dan auditor karena para pemimpin auditor dianggap mempunyai keahlian dan pengalaman yang lebih baik serta mempunyai citra yang lebih tinggi daripada staf auditor sehingga dapat menjadi mediator antara klien dan auditor yang melakukan proses audit (*Media Akuntansi* No. 25, Maret, 1998 dalam windasari 2010). Adanya komunikasi intensif antara klien dan auditor, akan memperlancar dan mempermudah proses audit.

9. Melakukan pekerjaan lapangan dengan tepat

Standar pekerjaan lapangan pertama mengharuskan bahwa “pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika menggunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya”. Pengawasan merupakan unsur yang sangat penting dalam audit karena cukup banyak bagian pekerjaan yang dilaksanakan oleh staf auditor yang belum berpengalaman (arens dkk, 2008). Dengan kata lain, standar pekerjaan lapangan yang pertama menentukan agar program kerja yang akan dilaksanakan direncanakan dengan matang dan pelaksanaannya oleh para asisten diawasi secara seksama. Perencanaan yang matang dan tepat diharapkan dapat memberikan jasa audit yang lebih baik lagi, sehingga proses audit dapat selesai tepat waktu dan jasa yang diberikan sesuai dengan yang diharapkan oleh klien.

10. Keterlibatan komite audit

Komite audit diperlukan dalam suatu organisasi bisnis antara lain dikarenakan mengawasi proses audit dan memungkinkan terwujudnya kejujuran laporan keuangan. Melibatkan komite audit dalam pelaksanaan audit dapat membantu auditor. Bilamana auditor telah menemukan bahwa terdapat bukti adanya kecurangan, masalah ini harus mendapatkan perhatian dari tingkat manajemen yang semestinya. Kecurangan yang melibatkan manajemen senior atau karyawan lain yang menyebabkan salah saji material dalam laporan keuangan harus dilaporkan secara langsung kepada komite audit. (IAI, 2001).

11. Standar etika yang tinggi

Seorang auditor harus dapat meningkatkan akuntabilitasnya dengan cara menegakkan etika profesional yang tinggi. Terkadang auditor menghadapi banyak dilema etika dalam menjalankan karier bisnis mereka, misalnya bernegosiasi dengan klien yang mengancam akan mencari auditor baru kalau perusahaannya tidak memperoleh pendapat wajar tanpa pengecualian (arens dkk, 2008). Audit yang berkualitas tinggi sangat penting untuk menjamin bahwa profesi akuntan memenuhi tanggung jawabnya kepada investor, masyarakat umum dan pemerintah serta pihak-pihak lain yang mengandalkan kredibilitas laporan keuangan yang telah di audit. Dengan menegakkan etika profesi akuntan yang tinggi, seorang auditor tetap berada pada "jalur" yang benar sehingga proses audit yang dilakukan dapat memberikan hasil yang memuaskan klien sebagai pengguna.

12. Tidak mudah percaya

Audit atas laporan keuangan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia harus direncanakan dan dilaksanakan dengan sikap skeptisme profesional. Skeptisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis bukti audit (IAI, 2001).

Dalam Pernyataan Standar Pemeriksaan 03 SPKN tentang Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuangan mengatur standar pelaporan untuk pemeriksaan keuangan. Untuk pemeriksaan keuangan, Standar Pemeriksaan memberlakukan empat standar pelaporan SPAP yang ditetapkan oleh IAPI, berikut ini:

- a) Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau prinsip akuntansi yang lain yang berlaku secara komprehensif.
- b) Laporan auditor harus menunjukkan, jika ada, ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
- c) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
- d) Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal auditor dikaitkan dengan laporan

keuangan, laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul auditor.

4. Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian yang berkaitan dengan Good Corporate Governance dan kualitas audit laporan keuangan adalah sebagai berikut. Menurut Jamaan (2008) yang berjudul pengaruh mekanisme Corporate Governance dan kualitas kantor Akuntan Publik terhadap Kualitas laporan keuangan menyatakan bahwa GCG dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Penelitian Afria (2008) tentang pengaruh independensi auditor eksternal dan prinsip-prinsip GCG terhadap kualitas laporan keuangan pada perusahaan BUMN. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa prinsip-prinsip GCG berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan BUMN.

Penelitian Sherlly (2011) tentang pengaruh Good Corporate Governance terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Good Corporate Governance berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin baik penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance maka kualitas laporan keuangan juga akan semakin baik.

Penelitian Susiana & Herawati (2007) tentang Analisis pengaruh Independensi, mekanisme Corporate Governance dan kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan. Penelitian ini dari tahun ke tahun mengalami

perbedaan hasil, seperti Penelitian tahun 2000, 2001, 2002 untuk pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa independensi yang diukur dengan *fee audit* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Penelitian tahun 2003 untuk pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa independensi yang diukur dengan *fee audit* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Penelitian tahun 2000 dan 2001 untuk pengujian hipotesis kedua menunjukkan mekanisme *corporate governance* yang diukur dengan keberadaan komite audit dalam perusahaan, keberadaan komisaris independen dalam perusahaan, persentase saham yang dimiliki oleh institusi, serta persentase saham yang dimiliki oleh manajemen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

Penelitian tahun 2002 dan 2003 untuk pengujian hipotesis kedua menunjukkan mekanisme *corporate governance* yang diukur dengan keberadaan komite audit dalam perusahaan, keberadaan komisaris independen dalam perusahaan, persentase saham yang dimiliki oleh institusi, serta persentase saham yang dimiliki oleh manajemen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Penelitian tahun 2000 sampai 2003 untuk pengujian hipotesis ketiga menunjukkan kualitas audit yang diukur dengan ukuran KAP tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

Penelitian Mayangsari (2003) mendukung hipotesis bahwa spesialisasi industri auditor berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Hasil lain menunjukkan bahwa independensi berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan dan mekanisme *corporate governance* berpengaruh secara

statistis signifikan terhadap integritas laporan keuangan meskipun tidak sesuai dengan tanda yang diajukan dalam hipotesis.

B. Hubungan Antar Variabel

a. Hubungan mekanisme GCG terhadap Integritas Laporan Keuangan

Dalam penelitian ini mekanisme *good corporate governance* diukur dengan adanya prinsip *good corporate governance*. Prinsip-prinsip tersebut digunakan untuk mengukur seberapa jauh GCG telah diterapkan dalam perusahaan :

1. Kewajaran (*fairness*).

Prinsip kewajaran menekankan pada adanya perlakuan dan jaminan hak-hak yang sama kepada pemegang saham minoritas maupun mayoritas, termasuk hak-hak pemegang saham asing serta investor lainnya. Praktik kewajaran juga mencakup adanya sistem hukum dan peraturan serta penegakannya yang jelas dan berlaku bagi semua pihak. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan pemegang saham dari praktik kecurangan (*fraud*) dan praktik-praktik *insider trading* yang dilakukan oleh agen/manajer. Prinsip kewajaran ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah yang timbul dari adanya hubungan kontrak antara pemilik dan manajer karena diantara kedua pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda (*conflict of interest*).

2. Akuntabilitas (*accountability*).

Prinsip akuntabilitas berhubungan dengan adanya sistem yang mengendalikan hubungan antara unit-unit pengawasan yang ada di perusahaan.

Akuntabilitas dilaksanakan dengan adanya dewan komisaris dan direksi independen, dan komite audit. Akuntabilitas diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi *Agency Problem* yang timbul antara pemegang saham dan direksi serta pengendaliannya oleh komisaris. Praktik-praktik yang diharapkan muncul dalam menerapkan akuntabilitas diantaranya pemberdayaan dewan komisaris untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen guna memberikan jaminan perlindungan kepada pemegang saham dan pembatasan kekuasaan yang jelas di jajaran direksi.

3. Transparansi (*transparency*).

Prinsip dasar transparansi berhubungan dengan kualitas informasi yang disajikan oleh perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat tergantung dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu dan dapat dibandingkan dengan indikator-indikator yang sarna. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi yang berbasiskan standar akuntansi dan *best practices* yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas, mengembangkan teknologi informasi dan sistem informasi akuntansi manajemen untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh dewan komisaris dan direksi; termasuk juga mengumumkan jabatan yang kosong secara terbuka. Dengan kata lain prinsip transparansi ini menghendaki adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam penyajian (*disclosure*) informasi yang dimiliki perusahaan.

4. *Responsibilitas (responsibility)*.

Responsibilitas diartikan sebagai tanggungjawab perusahaan sebagai anggota masyarakat untuk mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku serta pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial. Responsibilitas menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Hal tersebut untuk merealisasikan tujuan yang hendak dicapai GCG yaitu mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis dan pihak-pihak lainnya.

Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip - prinsip GCG tersebut secara konsisten terbukti dapat meningkatkan integritas laporan keuangan (Beasley dalam Arief & Bambang, 2007).

b. Hubungan Kualitas Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan

Para pengguna laporan keuangan berpendapat bahwa kualitas audit yang dimaksud terjadi jika auditor dapat memberikan jaminan bahwa tidak ada salah saji yang material (*no material misstatements*) atau kecurangan (*fraud*) dalam laporan keuangan. Maka integritas laporan keuangan akan meningkat apabila kualitas audit sesuai dengan standar auditing.

Mayangsari 2003, menggunakan *industry specialization* sebagai proksi kualitas audit. Ini didasari oleh penelitian Craswell 1995, yaitu bahwa auditor yang spesialis akan mendapat *fee* yang lebih tinggi. Tentunya hal tersebut akan mempengaruhi kualitas audit, apakah dia spesialis atau tidak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa spesialisasi auditor berpengaruh positif terhadap integritas

laporan keuangan. Pelaksanaan pemeriksaan yang didasarkan pada Standar Pemeriksaan akan meningkatkan kredibilitas informasi yang dilaporkan atau diperoleh dari entitas yang diperiksa melalui pengumpulan dan pengujian bukti secara obyektif (SKPN 2007).

C. Kerangka Konseptual

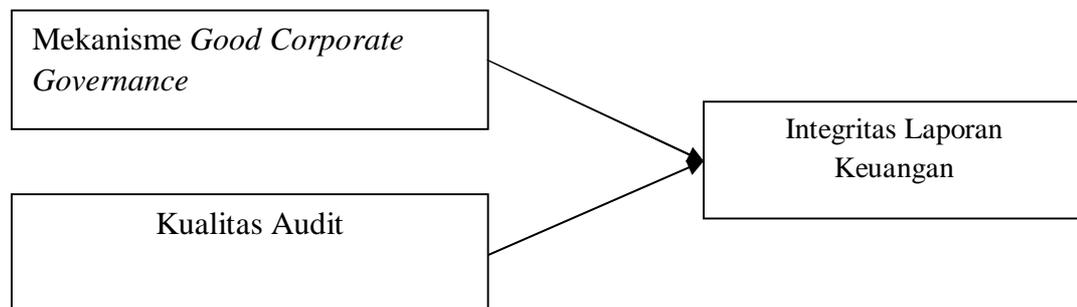
Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Integritas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang menampilkan kondisi suatu perusahaan yang sebenarnya, tanpa ada yang ditutup-tutupi atau disembunyikan. Laporan keuangan dikatakan berintegritas apabila laporan keuangan tersebut memenuhi kualitas *reliability* dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum atau standar yang telah ditetapkan.

Good Corporate Governance dapat didefinisikan sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.

Mekanisme *good corporate governance* yang diukur dengan prinsip-prinsip *good corporate governance* apabila di terapkan akan menghasilkan beberapa manfaat untuk perusahaan. Selain itu, prinsip-prinsip *good corporate governance* terbukti dapat meningkatkan integritas laporan keuangan suatu perusahaan.

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan (*probability*) dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan. Tujuan pemeriksaan laporan keuangan adalah agar dapat meningkatkan kredibilitas informasi laporan keuangan perusahaan. Kualitas audit ini sangat penting karena kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mekanisme *good corporate governance* dan kualitas audit mempunyai pengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Hubungan dari variabel ini dapat digambarkan dalam kerangka konseptual berikut ini:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Berdasarkan teori dan latar belakang diatas maka dapat dibuat beberapa hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁ : Terdapat pengaruh yang signifikan positif dari mekanisme *good corporate governance* terhadap integritas laporan keuangan.

H₂: Terdapat pengaruh yang signifikan positif dari kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh mekanisme *good corporate governance* dan kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah diajukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Mekanisme *good corporate governance* tidak berpengaruh signifikan positif terhadap integritas laporan keuangan.
2. Kualitas audit tidak berpengaruh signifikan positif terhadap integritas laporan keuangan.

B. Keterbatasan

Meskipun penelitian ini telah selesai dilaksanakan, tetapi penelitian ini masih memiliki kelemahan-kelemahan sebagai berikut :

1. Dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 17,7 %. Sedangkan 82,3% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti seperti independensi auditor, *audit tenure* dan ukuran perusahaan.
2. Penyebaran kuesioner pada beberapa BUMN masih memiliki kendala dalam prosedur perizinan dan pengisian kuesioner. Hal tersebut menyebabkan data yang diolah kurang optimal, untuk penelitian selanjutnya diharapkan responden yang dituju dapat melakukan pengisian kuesioner yang disebarakan.

3. Data penelitian yang berasal dari responden yang disampaikan secara tertulis dalam bentuk kuesioner akan mempengaruhi hasil penelitian. Karena persepsi responden yang disampaikan belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya (subjektif) dan akan berbeda apabila data diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden.

C. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka penulis mencoba untuk memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi manajemen perusahaan agar dapat meningkatkan pengendalian internalnya dan menjamin adanya hak yang sama antara pemegang saham minoritas dengan mayoritas sehingga tercapai integritas laporan keuangan untuk para pemakai laporan keuangan.
2. Bagi auditor yang akan mengaudit suatu perusahaan disarankan agar lebih kritis lagi dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan dan juga dilakukan secara sistematis.
3. Untuk penelitian selanjutnya, dapat dilakukan dengan metode lain untuk mendapatkan data yang lengkap, misalnya dengan melakukan wawancara secara langsung dengan responden dalam pengisian kuesioner sehingga jawaban responden lebih mencerminkan jawaban yang sebenarnya. Dan untuk meneliti judul yang sama, peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar dapat menambahkan variabel lain karena masih banyak faktor-faktor lain yang mampu menjelaskan variabel integritas laporan sehingga perlu dikembangkan dalam review penelitian selanjutnya.